



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI BANTEN**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
BAWASLU**

JAKARTA,

SELASA, 16 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Banten

PEMOHON

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Demokrat
(Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Nasdem
(Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
4. Partai Kebangkitan Bangsa
(Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
5. Partai Berkarya
(Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
6. Partai Hati Nurani Rakyat
(Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

Selasa, 16 Juli 2019, Pukul 08.00 – 10.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) Saldi Isra
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Hasri Puspita Ainun
Muchtar Hadi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ace Kurnia
2. Mulyadi Marks Phillian

B. Pemohon Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Syamsuddin (Perwakilan)

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ewi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Mu'jizatullah

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Heriyanto Citra Buana
2. Ibrani

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Raden Elang Yayan Mulyana

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Asep Dedi
2. Isnaldi
3. Abdul Salam

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dirzy Zaidan
2. Jayen Suwarsiatna

I. Termohon:

1. Nurkhayat Santosa
2. Wahyu Setiawan

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Akhmad Jazuli
2. Bagus Setiawan

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Sigit Nurhadi Nugraha
2. Mohammad Ulin Nuha

L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hendri Sita Ambar Kumalawati

M. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Berna Sudjana Ermaya
2. Fitri Aprilia Rasyid

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Maulana Bungaran

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Fadli Nasution
2. Fahrozi

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. M. Hadrawi Ilham | (Partai Persatuan Pembangunan) |
| 2. Bagus Setiawan | (Partai Persatuan Pembangunan) |
| 3. Nurul Amalia | (Partai Keadilan Sejahtera) |
| 4. Hikmat Prihadi | (Partai Keadilan Sejahtera) |
| 5. Irfan Rifa'i | (Partai Keadilan Sejahtera) |

- | | |
|-----------------------|---|
| 6. Harli Muin | (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) |
| 7. Astiruddin Purba | (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) |
| 8. M. Pilipus Tarigan | (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) |

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ferry Anka Sugandar
2. Wiwin W. Windiantina
3. Kartono

R. Bawaslu:

1. Mochammad Afifuddin
2. Didih M. Sudi
3. Nuryati Solapari
4. Badrul Munir
5. Bella O.
6. Adelline Syahda

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Sidang dalam Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem, Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa, Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya dan Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat.

Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan untuk Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

Belum hadir, ya? Kita mulai pas pukul 08.00 WIB, jadi belum hadir.

Kemudian, Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah hadir? Silakan!

2. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi semuanya.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Termohon, Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

3. KETUA: ASWANTO

Kok Termohon? (...)

4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Yang diajukan oleh (...)

5. KETUA: ASWANTO

Pemohon dulu dong!

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Oh, Pemohon dulu.

7. KETUA: ASWANTO

Pemohon dulu!

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EWI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Demokrat, Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang hadir saya sendiri, Ewi, S.H., dan perwakilan dari Prinsipal kami hadir. Perwakilan.

10. KETUA: ASWANTO

Baik.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EWI

Ya, terima kasih.

12. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami Pihak Pemohon dari Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Nasional

Demokrat. Saya sendiri, Heriyanto Citra Buana dengan rekan kami, Ibrani. Terima kasih.

14. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 1 ... eh, Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Kebangkitan Bangsa. Belum hadir, ya?

Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Berkarya!

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ISNALDI

Assalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ASWANTO

Ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ISNALDI

Saat ini kami hadir, Kuasa. Saya sendiri, Isnaldi. Rekan saya, Asep Dedi, dan sebelah saya, Pak Abdul Salam.

18. KETUA: ASWANTO

Baik.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ISNALDI

Terima kasih.

20. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Berikutnya, Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Hati Nurani Rakyat?

21. KUASA HUKUM PRMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum DPP Partai Hati Nurani Rakyat dengan saya, Dirzy Zaidan, sama rekan saya, Jayen. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb. Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah hadir? PDIP? Belum, ya? Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa juga belum hadir.

Baik. Sekarang untuk Pihak Termohon. KPU siapa yang akan memperkenalkan?

23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Baik.

24. KETUA: ASWANTO

Biasanya dari beberapa lembaga bantuan hukum. Silakan!

25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Pada saat ini, kita sudah hadir Termohon, kami dari Kantor Absar Kartabrata dan Rekan telah hadir, Dr. Berna Sudjana Ermaya dan Fitri. Nanti ada juga yang lainnya. Silakan!

26. KETUA: ASWANTO

Dari kantor bantuan hukum lainnya?

27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Akhmad Jazuli dengan rekan saya, Bagus Setiawan dan pada saat ini, Termohon Prinsipal juga hadir dari KPU dan juga dari KPU Provinsi Banten, Bapak Nurhayat Santosa dan Mas (...)

28. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya dari ... sudah? Masih ada, ya? Wah, ini yang tadi sudah nyambar (...)

29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap, ya.

30. KETUA: ASWANTO

Silakan, Pak!

31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya, mohon maaf. Kami dari Nurhadi Sigit Law Office. Saya sendiri, Muhammad Ulin Nuha, bersama Pak Sigit Nurhadi Nugraha di belakang saya. Terima kasih.

32. KETUA: ASWANTO

Baik.

33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Untuk Perkara Demokrat dan Nasdem.

34. KETUA: ASWANTO

Baik.

35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

36. KETUA: ASWANTO

Masih ada Kuasa KPU? Cukup, ya?
Selanjutnya untuk Bawaslu. Silakan, Pak Ustad!

37. BAWASLU: MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pagi ini kami dari Bawaslu, saya Mochammad Afifuddin (Komisioner Bawaslu RI) dan yang akan memberi keterangan nanti Bawaslu Banten. Sebelah kiri saya, Ketua Bawaslu Banten, Pak Didih M. Sudi. Sebelah kanan saya, Bu Nuryati Solapari. Di belakang ada Pak Badrul Munir dan juga Bu Bella. Terima kasih.

38. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Dari KPU RI tadi ada yang hadir?

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Tidak, Yang Mulia.

40. KETUA: ASWANTO

Oh (...)

41. TERMOHON: WAHYU SETIAWAN

Yang Mulia. Dari KPU RI, Wahyu Setiawan.

42. KETUA: ASWANTO

Soalnya tampilannya bukan seperti komisioner, tapi seperti lawyer, gitu, ya. Mohon maaf, Pak.

43. TERMOHON: WAHYU SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ASWANTO

Ya, baik. Selanjutnya, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ada? Pihak Terkait untuk Perkara

Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia? Ini karena Pemohon juga tadi belum hadir, ya.

Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak ada, ya?

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Ada, Yang Mulia.

46. KETUA: ASWANTO

Partai Demokrat, silakan!

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Pihak Terkait dari Partai Demokrat, saya sendiri Fadli Nasution. Di ... rekan sebelah kanan saya ada Fahrozi.

Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ASWANTO

Baik. Dari Partai apa Bapak ini?

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Kami dari Partai Demokrat, Yang Mulia.

50. KETUA: ASWANTO

Berarti ini internal, ya?

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Internal.

52. KETUA: ASWANTO

Oke.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Izin, Yang Mulia.

54. KETUA: ASWANTO

Ya.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Pada persidangan yang lalu sesuai dengan absensi, kami berada di kursi C-03 dan C-04.

56. KETUA: ASWANTO

Ya ini setiap ... setiap sidang diatur, Pak. Ya, tidak ... tidak mesti bahwa sidang sebelumnya di C-04, lalu kemudian di sidang berikutnya harus C-04 lagi. Ini sudah diatur disistem, Pak.

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Oh, begitu. Ya, terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: ASWANTO

Nanti kalau Bapak di depan terus yang belakangan nanti agak ... kurang terlihat, gitu, ya, makanya digilir, gitu.

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: ASWANTO

Diacak, yang mengacak itu sistem.

Baik, masih ada untuk Demokrat, Pihak Terkait, Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Enggak ada lagi?

Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

62. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

64. KETUA: ASWANTO

Ya.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, saya sendiri M. Hadrawi Ilham dan di dampingi oleh rekan saya, Bagus Setiawan.

66. KETUA: ASWANTO

Baik.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Masih ada Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Ada, Majelis.

70. KETUA: ASWANTO

Silakan!

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Keadilan Sejahtera, saya Nurul Amalia dengan rekan saya, Irfan Rifa'i dan Hikmat Prihadi. Permohonannya Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ada Pihak Terkait? Enggak ada, ya.

Kemudian untuk Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, ini tidak ada juga Pihak Terkaitnya.

Kemudian Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat? Enggak ada juga Pihak Terkaitnya, ya.

Untuk Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDIP, sudah hadir?

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Mohon maaf, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

74. KETUA: ASWANTO

Oke, silakan dari partai mana Ibu?

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Ya, saya Wiwin Windiantina, dengan Pak Fery Angka Suganda, dan Pak Kartono. Terima kasih.

76. KETUA: ASWANTO

Partainya, ya?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Dari Partai Kebangkitan Bangsa.

78. KETUA: ASWANTO

PKB, ya?

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Ya.

80. KETUA: ASWANTO

Baik.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Terima kasih, Yang Mulia.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAULANA BUNGARAN

Izin, Yang Mulia ... Izin, Yang Mulia.

83. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAULANA BUNGARAN

Pihak Terkait.

85. KETUA: ASWANTO

Dari Partai mana?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAULANA BUNGERAN

Dari Partai Gerindra untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohonnya PDIP.

87. KETUA: ASWANTO

Lho tadi kan sudah di ini ... sebentar (...)

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAULANA BUNGERAN

Saya mau (...)

89. KETUA: ASWANTO

PDIP sudah hadir? Silakan, perkenalkan diri dulu!
Sebentar, Mas, ya!

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai Pemohon PDIP diwakili oleh Bapak Mulyadi M. Phillian di samping kanan saya dan saya sendiri Ace Kurnia, Yang Mulia.
Terima kasih.

91. KETUA: ASWANTO

Baik. Karena Saudara terlambat, maka konsekuensinya Anda nanti nomor 5 untuk penyampaiannya, ya. Karena masih ada 1 yang masih terlambat juga sampai sekarang belum hadir atau sudah hadir? Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKB? Oh, sudah hadir juga? Berarti Anda nanti nomor 6 sesudah PDIP.
Silakan memperkenalkan diri! Tolong Petugas miknya!

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mewakili Partai

PKB yang kebetulan hari ini cuma saya yang bisa hadir, Yang Mulia, Raden Elang Yayan Mulyana.

93. KETUA: ASWANTO

Baik, ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADEN ELANG YAYAN MULYANA

Terima kasih.

95. KETUA: ASWANTO

Baik, ya. Ini kan karena Anda juga tidak presentasi, ya. Gilirannya Termohon ini. Selanjutnya?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAULANA BUNGERAN

Izin, Majelis.

97. KETUA: ASWANTO

Apa itu? Ya, sori. Itu yang saya mau persilakan tadi.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAULANA BUNGERAN

Ya.

99. KETUA: ASWANTO

Untuk Pihak Terkait PDIP tadi?

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MAULANA BUNGERAN

Ya, Yang Mulia. Kami dari Partai Gerindra, saya Maulana Bungaran untuk Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pihak Terkait ... selaku Pihak Terkait dari Permohonan yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: ASWANTO

Baik, semua sudah, ya? Sebelum kita melanjutkan pemeriksaan, ada beberapa hal yang perlu kami permaklumkan lebih awal.

Pertama. Bahwa untuk Pihak Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu agar yang disampaikan adalah jawaban ... perbaikan jawaban atau perbaikan keterangan yang tidak lewat tenggat waktu. Kalau yang lewat tenggat waktu, walaupun Saudara presentasikan, itu juga tidak dinilai oleh Mahkamah.

Yang kedua. Bahwa Panel sudah mempelajari perbaikan jawaban Termohon, Pihak Terka ... Termohon, kemudian Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu kita sudah pelajari, sehingga pada penyampaian perbaikan ini cukup disampaikan bagian pokok-pokoknya saja, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, ya. Kami sudah mempelajari, bahkan titik, komanya kita sudah baca perbaikan permohonan Saudara, dan perbaikan keterangan Bawaslu, dan Pihak Terkait.

Baik untuk selanjutnya dimohon kesediaan Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Saldi Isra untuk memandu pemeriksaan perkara ini. Silakan, Prof!

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulai, yang baru datang itu dari mana? PDI Perjuangan? Jadi Pihak Terkait?

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Perkara berapa?

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. PDIP, ya? Ada lagi? Namanya siapa? Kami bertiga, saya Pilipus Tarigan (...)

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Duduk saja ... duduk saja!

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ada Pak Harli serta Astiruddin Purba, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Terima kasih.

111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ada lagi?

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Dari Termohon, Yang Mulia.

113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Termohon, silakan! Dari kantor apa, Bu?

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners, selaku Kuasa Hukum (...)

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Untuk perkara?

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Dari Perkarannya Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, ya?

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Ya, betul, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, ada lagi? Tidak, ya?

Nah, ini ada 6 yang harus kita selesaikan sampai pukul 10.00 WIB jadi semakin efektif penggunaannya, itu semakin baik. Jadi Pak Fadli Nasution enggak perlu di depan, yang penting efektifnya, begitu. Dulu sering nulis di Hukum Online, ya? Saya baca-baca, tapi sekarang enggak kelihatan lagi. Orang makin ... makin terkenal, makin susah nulis saya liat ini. Susahnya, begitu. Ya Pak Fadli, ya?

Pertama kita persilakan kepada Termohon untuk Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan! Mau pindah, ya? Waduh ini harusnya supirnya yang di depan tadi. Silakan, Pak! Pokok-pokoknya saja seperti yang dikatakan Ketua tadi! Bahwa kami sudah baca, bahkan sudah ada telaahnya.

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Dalam Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia, itu terdapat 2 permohonan, yaitu permohonan partai politik dan permohonan perseorangan.

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Perseorangan. Silakan! Mulai dari partai politik dulu, ya?

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Baik. Dalam permohonan partai politik, Yang Mulia. Pertama izinkan kami untuk menyampaikan Eksepsi terlebih dahulu.

123. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Eksepsinya dianggap dibacakan saja.

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Baik, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi langsung ke Pokok Permohonan.

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Baik. Pada Pokok Permohonan, Yang Mulia. Pertama yang perlu kami tekankan adalah bahwa memang (...)

127. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Dapil I Tangerang Selatan, ya?

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Ya, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Hanya satu Pemohon.

131. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

He em. Intinya memang ada laporan kepada Bawaslu, Yang Mulia, dengan Nomor 014, hanya saja kemudian itu sudah diperiksa dan selanjutnya diputus dengan putusan bahwa laporan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu satu.

Kedua. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 10 angka 4.1.9 menyampaikan adanya dugaan penggelembungan suara di 26 kecamatan, 68 kelurahan, dan 137. Itu sudah kami bantah dan (...)

133. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman berapa?

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Halaman 9 jawaban kami, Yang Mulia.

135. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 9, ya?

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Ya. Jadi perlu digaris bawahi bahwa itu me ... Pemohon tidak menyebutkan pada TPS mana, pada kelurahan mana, tapi ... selanjutnya untuk me ... me ... mendukung bantahan kami, kami menyampaikan T-009 yang meliputi DA, DA-1, dan DAA-1 pada 35 kecamatan di seluruh ... seluruh Provinsi Banten, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Itu ada di T-0 ... T-09 ... T-009, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

T-009, terus?

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

T-009-Banten ... -Banten I-Demokrat-54-14-16.

141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan! Ada lagi?

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Selanjutnya ... initynya adalah bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Termohon sudah kami bantah dan kami dukung oleh bukti.

143. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terus?

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Bahkan ada video tentang perbaikan pada Kecamatan Bojong atas laporan atas nama (...)

145. KETUA: ASWANTO

Itu video di mana di dalam keterangan ini?

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Video itu kami sampaikan pada T-010, Yang Mulia.

147. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman berapa di sini?

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Kami tidak mendalilkan yang ... (...)

149. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Mohon maaf, itu adalah bantahan pada 0 ... halaman 7, dalil kami nomor 4. Berkaitan dengan adanya laporan dari Yoyon Sudjana pada rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput atas nama Rohman Setiawan, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, itu bukti T-08, ya? Ya (...)

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Bukti T-10, Yang Mulia, reka ... perbaikan video ... rekaman video.

153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan! Ada lagi?

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Kami rasa cukup, Yang Mulia. Karena Pemohon tidak mendalilkan TPS secara detail, kami sudah membantah di T-009, itu.

155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, berarti selesai?

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Selesai, Yang Mulia.

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang lain?

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Yang Permohonan Perseorangan atas nama Sanudin, Yang Mulia.

159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sanudin. Kemarin ada masalah enggak? Ya, itu permohonan perseorangan sudah lewat waktu. Jadi enggak perlu direspon, ya.

160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Baik, Yang Mulia.

161. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kan sudah ada kesepakatan, kalau lewat waktu itu tidak akan dipertimbangkan.

162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti selesai, ya?

164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Terima kasih.

165. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti selesai secara hukum, gitu.

Berikut, kita lanjut ke Perkara 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Nasdem. Silakan! Masih dari kantor yang sama, ya?

166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya, benar, Yang Mulia.

167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan! Ini yang mau menyampaikan siapa?

168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Saya, Mohammad Ulin Nuha, Yang Mulia.

169. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohammad?

170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ulin Nuha.

171. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor berapa namanya di sini ini?

172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Di tadi di tulis sama Masnya B7 ... B6 ... 7.

173. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Inikan jawaban Termohon, ini?

174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya.

175. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di kuasa ini nomor berapa namanya?

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Oh, nomor 8, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 8. Kok ini Herlin Susanto di sini?

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Mohammad Ulin Nuha, Yang Mulia, nomor 8.

179. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

181. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda ikut tanda tangan enggak di Permohonan ini?

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ikut, Yang Mulia.

183. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ada tanda tangannya?

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya, siap.

185. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Untuk Permohonan Partai Nasdem, Nomor Perkara 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, ada 3 dapil, Yang Mulia. Dapil pertama, DPR RI Dapil I, Banten I. Untuk kedua, DPR RI Dapil Banten III. Dan yang ketiga, untuk pemilihan DPRD Tangsel V, Yang Mulia.

187. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ada 3, ya?

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya, ada 3 dapil.

189. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan mulai dari Dapil Banten I.

190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya. Saya bacakan Eksepsinya atau ke Pokok Perkaranya, Yang Mulia?

191. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pokok Perkara.

192. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Pokok Perkara langsung. Ya, siap.

193. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu sudah pakemnya dari kemarin.

194. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap. Untuk Dapil I, Banten I. Pemohon mendalilkan ada dugaan TSM terhadap Caleg dari PPP atas nama H. Iip Miftahul Khoiri, S.Pd., kemudian sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, tidak terbukti ada (...)

195. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu halaman berapa dari jawaban Anda ini?

196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Halaman 10, Yang Mulia.

197. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jangan ceritakan yang tidak tertulis, ya.

198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

199. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Jadi, tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilu, begitu, Yang Mulia, ketika ada apel wawasan kebangsaan ini.

201. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terus!

202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Hanya itu yang dipermasalahkan untuk di Dapil I, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, lanjut ke (...)

204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Dapil III.

205. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Banten, ya?

206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya. Dapil III Banten.

207. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini untuk provinsi, ya?

208. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Untuk pro ... untuk DPR RI juga, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Untuk DPR RI juga?

210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya, untuk DPR RI juga.

211. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Dari Dapil III ini, Pemohon mempermasalahkan adanya dugaan penambahan suara bagi Partai Nasdem juga PKS, PDI, dan Golkar, Yang Mulia.

213. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

214. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Yang ini terjadi di Tangerang Selatan, ada di 8 kecamatan. Kemudian untuk di Kabupaten Tangerang, ada 9 kecamatan. Yang semuanya berbasis TPS-TPS, Yang Mulia. Itu kita bantah di (...)

215. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman (...)

216. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Jawaban halaman ... mulai halaman (...)

217. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

11?

218. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

11, Yang Mulia, ya.

219. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sampai?

220. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Sampai 45, kalau enggak salah.

221. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, banyak sekali angkanya, ya?

222. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya, dalam TPS-TPS itu, Yang Mulia.

223. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini semuanya ada buktinya, ya?

224. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya, ada buktinya. Kita tolak, kita ajukan bukti-bukti yang kita miliki, Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kami tolak, jangan *kita*. Saya kan enggak ikut nolaknya.

226. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya, siap.

227. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, itu (...)

228. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Termohon tolak, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu *kita* dengan *kami* beda lho konsekuensinya.

230. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap, ya.

231. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau honorinya, boleh Anda pakai *kita*.

232. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

233. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi, kalau untuk pekerjaan ini, *kami*, begitu. Silakan!

234. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya, cukup untuk Dapil Banten III, Yang Mulia.
Kemudian, untuk yang DPRD Tangsel V.

235. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tangsel V, ya.

236. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Tangsel V, ini ada dugaan penambahan suara bagi Partai PKS dan pengurangan suara bagi Pemohon, Partai Nasdem, Yang Mulia.

237. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

238. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ini di ... terjadi di 11 kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia. Mulai Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Kacang Timur, Kecamatan Pondok Pucung, Kecamatan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Betung, dan Kecamatan Parigi Lama, dan ini kita bantah mulai halaman 46 sampai terakhir, Yang Mulia, ini jawaban kita, Yang Mulia.

239. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terakhir itu halaman berapa?

240. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Kita buktikan juga di alat bukti yang kita lampirkan (...)

241. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sampai halaman 61?

242. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Sampai halaman 61, Yang Mulia, siap.

243. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, langsung Petitem!

244. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Terima kasih.

245. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini gabung Petitemnya untuk semua, ya?

246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap, Yang Mulia.

247. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Gabung. Anda baca betul enggak, apa itu Keputusan KPU Nomor 987 itu?

248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya, di kantor ada hard copy-nya satu, yang besar itu, Yang Mulia.

249. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada, ya?

250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ada, Yang Mulia.

251. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ... jadi judulnya memang begitu, ya?

252. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya.

253. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, ya?

254. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ada DPD juga sebenarnya.

255. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Wah (...)

256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

DPD juga (...)

257. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, sudah mulai berubah kan kalau saya tanya satu lagi, berubah juga ini. Ya ini ... ini apanya ... hati-hati lho (...)

258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya.

259. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau, apa itu (...)

260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

261. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap, Yang Mulia.

263. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, ada lagi yang lain?

264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Cukup, Yang Mulia, dari kita (...)

265. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Cukup. Ini kalau ... kalau tidak hati-hati nanti honorinya dikurangi, ya, Pak Wahyu, ya.

266. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

267. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kita masuk Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya, PKB!

268. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PKB, Termohon menjawab (...)

269. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini siapa yang menyampaikan?

270. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Bagus Setiawan, Yang Mulia.

271. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor berapa di sini? 13, ya?

272. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

13.

273. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, saya cek dahulu, Anda ikut tanda tangan atau tidak? Bagus Setiawan. Soalnya kalau tidak tanda tangan nanti ada konsekuensi yuridis dan konsekuensi ekonomisnya. Silakan, Mas Bagus!

274. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

275. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa dapil yang dipersoalkan di sini?

276. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Satu dapil, Yang Mulia.

277. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Satu dapil. Berapa itu?

278. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Dapil Banten VI.

279. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dapil Banten VI, silakan!

280. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Dalam Pokok Permohonan. Pertama bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik, diakui validitas, maupun kebenarannya oleh Termohon.

Dua. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR provinsi pada Dapil Banten VI adalah sebagai berikut. Pada Kecamatan Tangerang Tengah ... Tangerang Kera ... Karang Tengah, mohon maaf.

281. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, itu Tangerang Tengah dengan Karang Tengah beda lho. Ini yang Anda maksud ini Tangerang Tengah atau Karang Tengah?

282. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Karang Tengah.

283. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. Silakan!

284. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Kecamatan Karang Tengah.

285. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

286. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Tabel mohon dianggap dibacakan.

287. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

288. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 8 suara adalah tidak benar, Bukti T-003, T-004, dan T-005.

289. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu enggak ada *karena*-nya, ya? Inikan Anda menyatakan di sini bahwa terjadi pengurangan perolehan suara di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 8 suara adalah tidak benar, bukti. *Karena*-nya enggak ada, ya?

290. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Tidak ada.

291. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, silakan, teruskan!

292. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Bahwa terdapat ... terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 267 suara adalah tidak benar.

293. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

294. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Sebagaimana Bukti T-003, T-004, dan T-005.

295. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lawyer yang baik itu mestinya kalau dia mengat ... membantah sesuatu harus ada alasannya, lho.

296. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Karena nanti kami sepakat untuk disajikan di pembuktian langsung, Yang Mulia.

297. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bagaimana Anda bisa yakin ini mau ke pembuktian?

298. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Insya Allah kami yakin, Yang Mulia.

299. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu, orang ada tahapan dismissal. Silakan, terus!

300. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Bahwa senyatanya tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap proses rekapitulasi yang dijalankan oleh Termohon, Bukti T-007.

301. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu apa T-007 itu? Bukti apa yang Anda sajikan di situ? Ingat enggak? Sudah, enggak usah dibaca. Saya mau menguji saja, biasanyakan kan ... silakan lanjutkan!

302. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia (...)

303. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti biar kalau ngecek juga bisa, kami staf juga bisa ngecek di sini.

304. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Untuk yang kedua di Kecamatan Ciledug, tabel dianggap dibacakan.

305. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

306. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Satu. Bahwa terda ... terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ciledug sebanyak 2 suara adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-003, T-004, dan T-005.

307. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Kalau begitu ini kan hampir, ya, hampir copy-paste saja semua, kan? Kecuali buktinya. Kalau begitu, Anda lanjut ke ... kan 2, ya? lanjut ke Petitum saja! Silakan!

308. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Konklusinya, Yang Mulia?

309. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di mana ada konklusinya, ini?

310. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Di bawah, sedikit (...)

311. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di halaman berapa?

312. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Halaman 4.

313. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

314. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Maka, berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Banten pada daerah pemilihan 6, yang benar menurut Termohon adalah ... untuk Partai Kebangkitan Bangsa=7.612 (...)

315. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dianggap dibacakan saja, ya?

316. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, dianggap dibacakan.

317. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus!

318. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Petitum.

319. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

320. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Dalam Eksepsi:

1. menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Permohon untuk ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dianggap dibacakan.

321. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bacakan sampai selesai! Itu kan kalau permintaan itu harus sampai tuntas.

322. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul ... harap direnvoi, Yang Mulia, pukul 01.46 WIB

323. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terus!

324. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Tentang Penetapan Penghitungan Hasil Suara Umum ... Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019.

325. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, ini ada lagi di belakangnya. Ini mau direnvoi atau dipertahankan? Yang dalam kurung itu. Pertahankan saja?

326. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Pertahankan, Yang Mulia.

327. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Terus, yang ketiga?

328. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR ... DPRD provinsi ... menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut.

3.1 Pelo ... Perolehan suara Pemohon (partai politik) di Provinsi Banten ... harap direnvoi, Yang Mulia.

329. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa itu? Apanya yang mau direnvoi?

330. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Papua Barat direnvoi jadi Banten.

331. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

332. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Copy paste, Yang Mulia.

333. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ketemu, kan? Nah, itu makanya. Jadi lawyer itu harus apa lho ... harus ... ini ... ini Anda sudah error, apa ini namanya ini ... oke? Yang ini tidak perlu dibacakan, ya?

334. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya, tidak perlu dibacakan.

335. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya suruh bacakan itu supaya lawyer itu tahu juga kesalahannya. Kalau Hakim salah, itu kita akui juga kemarin, kan? Salah, ada yang ... apa ... segala macam. Ini Papua Barat dengan Banten jauh sekali, ya kan? Kalau Anda naik pesawat jauh sekali, itu.

336. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya. Tapi, yang di bawahnya Dapil Banten VI, Yang Mulia.

337. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, tapi kan induknya ini? Jangan ngeles juga kalau salah, itu. Sudah, yang terakhir!

338. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Termohon, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

339. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah selesai, ya? Ini jadi apa juga ini ... jadi penilaian juga oleh KPU, Mas Wahyu. Jadi, kadang lawyer-lawyer hukum kantor yang enggak ... apa ini ... yang enggak presisi ini jadi catatan semua untuk nilainya ke depan.

340. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Mohon maaf, Yang Mulia (...)

341. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ada lagi?

342. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Kami mau menyampaikan alat bukti tambahan.

343. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti, ya?

344. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Ya.

345. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah ada daftar dan segala macamnya?

346. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Sudah, cuma 1, tertinggal (...)

347. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan diambil, Petugas! Nanti bisa diverifikasi langsung.

348. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGUS SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

349. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, sama-sama. Nanti hati-hati, ya? itu 'Titi DJ' namanya, hati-hati di jalan.

Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Silakan ini ... 20 ... oh, tadi melompat juga, saya itu. Kebangkitan Bangsa tadi sudah, ya? Harusnya kebangkitan ... terus, Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

350. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum (...)

351. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang bacakan Ibu (...)

352. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Oh, saya sendiri Hendri Sita dalam Kuasa nomor 9.

353. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hendri Sita Ambar, supaya standarnya sama, saya lihat juga, Ibu, tanda tangan atau tidak?

354. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Baik, Yang Mulia.

355. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan! Ini berapa dapil, Bu?

356. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

1 dapil.

357. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

1 dapil.

358. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Dari Pandeglang V.

359. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pandeglang V?

360. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Untuk kursi DPRD, Pak, kabupaten.

361. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini langsung ke pokok perkara saja, ya?

362. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perlu kami tegaskan sebelumnya bahwa jawaban Termohon ini dilengkapi oleh kronologis dan tanggapan dari KPU Pandeglang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon.

363. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu halaman berapa, itu?

364. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Ini pernyataan dari kami saja.

365. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ... lengkapinya di mana, itu?

366. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Sudah disertakan di T-009 (...)

367. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

368. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Mengenai kronologis, seperti itu.

369. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, ada, ya? Di bukti, ya?

370. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Ya, ada.

371. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

372. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Ya, baik. Dalam Pokok Perkara. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara. Secara umum (...)

373. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

374. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Kami sampaikan pokok-pokoknya mengenai jawaban kami, Yang Mulia.

375. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

376. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Bahwa pada pokoknya di sini Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pengurangan suara terhadap Pemohon dan penambahan suara terhadap PAN atau Partai Amanat Nasional, dan di sini kami ingin membantah bahwa tidak benar dalil tersebut bahwa proses rekapitulasi ini sudah dilakukan secara manual, dan berjenjang dan diawasi juga oleh Bawaslu, dan disaksikan juga oleh para saksi peserta pemilu dari mulai tingkat PPK di bawah, hingga tingkat kabupaten, dan semua yang dalilkan oleh Pemohon di sini bahwa hasilnya adalah tidak ada perbedaan perolehan suara dari C-1 dengan DAA-1.

377. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu semua tabel yang ada, ya? Mulai dari halaman 7, 8, 9 (...)

378. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Betul, Yang Mulia.

379. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sampai halaman 10, 11?

380. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

10, 11. Betul, Yang Mulia.

381. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, lanjut ke Petitem!

382. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Ya, baik.

383. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti kalau apa ... ini semuanya kan kami upload, ya. Jadi, yang lain kan bisa mengambilnya ... mendownload-nya.

Nah, nanti ... nanti dicek, ya. Kalau enggak nanti Anda minta yang hard copy-nya juga bisa dikasih.

Silakan dilanjutkan ke Petitem!

384. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Petitem. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Demikian, Yang Mulia.

385. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Kita masuk ke Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? Ini dari kantor mana?

386. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Absar Kartabrata.

387. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Pak ... Pak Berna, ya?

388. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Pak Berna, nomor 2, Pak.

389. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, Berna, nomor 2. Karena enggak berubah-ubah wajahnya dari sidang pertama sampai sekarang.

390. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Alhamdulillah, Pak Saldi. Tetap tidak berubah.

391. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi, kumisnya lebih tebal dari rambutnya, Pak?

392. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul, Pak. Kemarin baru di ... cukuran.

393. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hafal betul sama saya, begitu. Silakan, Pak Berna! Da (...)

394. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Baik, terima kasih, Yang ... Majelis. Bahwa kami dari 3 ... Nomor Perkara 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pada ... dalam Eskepsi, 1 ... poin 1, poin 2 dianggap dibacakan, tapi kita di poin 3, saya ingin membacakan langsung.

Bahwa merupakan fakta hukum dalam Permohonan a quo tertanggal 24 Mei 2019, nyata-nyata berkaitan dengan 3.1, persandingan perolehan suara Partai Golkar untuk ang ... keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan, vide Permohonan angka 4.1.1, halaman 5.

Poin 3.2, persandingan perolehan suara Partai Go ... Golongan Karya keanggotaan DPRD Kabupaten Tangerang, vide Permohonan angka 4.1.1, halaman 5. Sementara dalam Permohonan tertanggal 30 Mei 2019, pengajuan penambahan atau penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), vide Permohonan a quo angka 1.1, halaman 5.

Bahwa dengan adanya perbaikan tertanggal 30 Mei 2019, haruslah dikualifikasikan sebagai pengajuan permohonan baru karena terbukti telah meru ... merubah, baik yang berkaitan dengan parpol in casu Golkar dengan PKB, maupun yang berkaitan dengan daerah pemilihan baru.

395. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Pak ... Pak apa ... Pak Berna, kalau *merubah* itu ndak Bahasa Indonesia, Pak. Merubah itu menjadi rubah dia. Yang benar Bahasa Indonesianya mengubah (...)

396. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Mengubah.

397. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Ini belajar Bahasa Indonesia juga sedikit. Terus!

398. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Mengubah.

399. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

400. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dalam Pokok Permohonan. Dalam Pokok Permohonan, menolak ... Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang telah tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan.

401. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

402. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dalam dalil ... dalam dapil-dapil yang dipermasalahkan, ada 2 dapil, kota (...)

403. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tangerang Selatan VI, silakan!

404. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya, Tangerang Selatan langsung (...)

405. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

406. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Di ket ... di Tangerang Selatan itu berkaitan tentang persandingan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, menurut Termohon dan Pemohon pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan ... Kota Tangerang Selatan VI di Kecamatan Ciputat.

Bahwa apa yang menurut tabel Pemohon nyatakan, Termohon menolak dengan tegas bahwa hal itu tidak benar karena merupakan

fakta hukum berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1, perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 6.908. Motifnya sama, Yang Mulia jadi (...)

407. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

He em.

408. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Poin 1, poin 2, poin 3 sama.

409. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

410. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dianggap dibacakan.

411. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus?

412. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Karena DAA (...)

413. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tabel juga dianggap dibacakan, ya?

414. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Untuk tabel Pemohonan ... Pemohon di tabel 2 ini menyangkut beberapa kecamatan (...)

415. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

416. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Juga hampir sama (...)

417. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Juga hampir sama atau sama? Kalau hampir sama tidak persis sama, Pak.

418. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya, tidak sama. Pada faktanya, kami menyatakan tidak benar karena (...)

419. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

420. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Merupakan fakta hukum berdasar Form Model DA-1 dan DAA-1, perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 55 Kelurahan Cirendeudeu sebanyak 19 ... Cirendeudeu (...)

421. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak usah dipaksakan, Pak, orang enggak bisa juga. Apalagi kalau saya yang menyebut itu, tambah salah lagi.

422. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Cirendeudeu, oke. Cirendeudeu sebanyak 19, begitu.

423. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

424. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Nah, ini ada sedikit ... ada tambahan bukti, Yang Mulia. Mohon dicatat, vide buktinya dari T-003 ditambah satu, T-004.

425. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu sudah diserahkan belum?

426. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Belum.

427. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, nanti, oke. Tabel ini enggak usah diucapkan semua (...)

428. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Eh ... udah ... udah ... udah ... buktinya sudah.

429. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, silakan!

430. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Nah, ini ... hal ini sama. Ini berkaitan dengan poin ... dari poin 4 sampai poin 11, Yang Mulia.

431. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

432. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Jadi ditambah T-004.

433. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sampai poin 11?

434. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

11.

435. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, halaman 6, ya?

436. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Poin 14, halaman 7 sampai (...)

437. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

438. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Poin 23 di halaman 8, sama T-nya ditambahkan.

439. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, 24-nya mau dibacakan?

440. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Nah, 24 bahwa ... bahwa dalil Pemohon (...)

441. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini bahwanya kita hilangkan satu, ya?

442. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya, bahwanya hilang, Pak.

443. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, repot. Kebanyakan bahwa.

444. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Kebanyakan. Bahwa dalam dalil Pemohon dalam Permohonan a quo dalam bagian 1 poin 2 pengurangan suara bagi Pemohon adalah dalil yang tidak mendasar, merupakan fakta hukum adalah sebagai berikut.

445. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

446. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ini tabelnya, kita dianggap dibacakan.

447. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 9, ya?

448. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Halaman 9.

449. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

450. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Bahwa terjadi pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 19 Kelurahan Cirendeui sebanyak 3 suara adalah tidak benar karena merupakan fakta hukum berdasarkan Form Model DAA ... DA-1 dan DAA-1, perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 19 Kelurahan Cirendeui sebanyak 0 suara.

451. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, ndak usah dibacakan semua, Pak.

452. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Selanjutnya tidak usah dibacakan.

453. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Masuk Dapil Tangerang I.

454. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Masuk Dapil Tangerang I.

455. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 13.

456. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Halaman 13, tabel 4 dianggap dibacakan. Perolehan suara Nasdem bahwa ... bahwa Pemohon memperhatikan ... Pemohon tidak menjelaskan locus yang dipersoalkan tidak jelas. Ada di desa kelurahan mana, kecamatan mana, bagaimana ... bagaimana. Maka, Termohon menanggapi dengan perolehan suara sesuai dengan Model DAA-1 KPU, Model DA-1 KPU, dan Model DB-1 KPU.

457. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

458. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Bahwa Pemohon mensandingkan ... mohon direnvoi, ini *C-1* nya dicoret.

459. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman berapa itu?

460. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Halaman 14.

461. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

14.

462. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

C-1 dan kata *dan* itu dicoret.

463. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

464. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Bahwa dalil Pemohon persandingkan DAA-1 Kabupaten Tangerang di Daerah Pemilihan Tangerang I, perolehan suara Partai Nasdem menurut Pemohon, C-1 sebanyak 293 suara, DAA-1 sebanyak 534, dan ada selisih 241 suara.

465. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di halaman berapa itu yang Bapak bacakan itu?

466. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

14, Pak.

467. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

13, enggak? Coba dilihat betul!

468. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

13. Oh, loncat, Pak, mungkin di bawah.

469. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, mungkin Bapak sejak potong rambut ini jadi gelap ilmunya ini, kayak cerita apa itu (...)

470. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Eenggak ini printannya kali ini.

471. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kayak cerita Samson, ya?

472. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Kalau ini 14, kalau di kita.

473. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kekuatannya jadi hilang kalau rambutnya dipotong. Silakan, Pak!

474. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Oke. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 241 adalah tidak benar. Bahwa merupakan fakta hukum berdasarkan ... ini juga di renvoi *C-1* ... *dan*-nya.

475. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

C-1?

476. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dan kata *dan*-nya di ... di apa (...)

477. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dihilangkan?

478. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dihilangkan. Berdasarkan DAA-1 jumlah perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 18.442 suara.

479. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

480. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Petitum.

481. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

482. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Petitum. Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (...)

483. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

484. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1 Perolehan suara untuk partai politik DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil VI di Kecamatan Ciputat Timur, Partai Politik PKB 7 ... perolehan suara 7.055, Hanura perolehan suara 6.908 (...)

485. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini persis sama dengan yang ada di dalam keputusan KPU, ya?

486. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul.

3.2 Perolehan suara untuk partai politik DPRD Kabupaten Tangerang Dapil I, Partai Politik Nasdem perolehan suara 18.442.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

487. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Pak Berna Sudjana.

488. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Ya.

489. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terakhir 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

490. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Izin, bisa saya mulai?

491. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Siapa yang mau bacakan ini?

492. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Saya Akhmad Jazuli.

493. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Akhmad Jazuli.

494. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Nomor 4.

495. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 4, ya?

496. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

497. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, Mas. Akhmad Jazuli, silakan!

498. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih.

499. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini berapa dapil yang dipersoalkan?

500. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Cuma 1.

501. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Cuma 1, ya?

502. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Jadi saya jawab dengan singkat.

503. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan! Jangan singkat-singkat banget, nanti terlalu singkat susah juga nanti.

504. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dalam Eksepsi, dianggap dibacakan.

Kemudian dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argument, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil I, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Jadi ini dalam 1 kecamatan saja (...)

505. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

506. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Di ... di 1, 2, 3 ,4, 5, 6 kelurahan (...)

507. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

508. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Dan kami sudah menyampaikan tabel persandingannya dari tabel 1 sampai dengan tabel 15, Yang Mulia.

509. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Tabel 15 di halaman?

510. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Halaman 9.

511. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi tidak ada halamannya di sini ini.

512. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Tidak muncul.

513. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

514. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Oke.

515. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang tabel 15, ya?

516. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih pengurangan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar sebagaimana ... mohon di renvoi itu di halaman 10-nya, setelahnya. Sebagaimana Bukti 001-Kota Tangerang Selatan I-PDIP-74-03-16 di situ tertulis dan, tapi mohon di renvoi menjadi sampai dengan Bukti T-004-Kota Tangerang Selatan I (...)

517. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, ini diganti dengan s/d, ya, sampai dengan?

518. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, sampai dengan T-004, Yang Mulia.

519. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

T-004 ini tertulis T-003 ini.

520. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Justru itu kami meminta renvoi.

521. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

522. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa demikian perolehan suara ditingkat Kecamatan Ciputat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Sebagaimana tabel, dianggap dibacakan.

523. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus! Petitem.

524. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan ... mohon maaf, itu juga ada salah ketik. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.80-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB pene ... atau penetapan penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019.

525. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

526. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana tabel, mohon dianggap dibacakan.

527. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini tabel sama dengan keputusan KPU itu, ya?

528. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Yang di kesimpulan juga.

529. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Oke.

530. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

531. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Selesai, ya? Jadi ... ada lagi Termohon yang mau menyampaikan? Sudah selesai semua.

Kita sekarang masuk ke Pihak Terkait. Kita mulai dari Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PKB, silakan!

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya Wiwin nomor urut 2 dalam Kuasa.

533. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Ya. Mohon izin kami membacakan pokok-pokoknya saja yang tidak terpisahkan (...)

535. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, dari ya ... Hanura yang men ... menjadi Pihak Terkaitnya PKB, ya?

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

PKB, betul.

537. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Kami membacakan pokok-pokoknya saja yang tidak terpisahkan secara keseluruhan sebanyak 17 halaman.

539. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Berkaitan dengan Permohonan Pemohon. Bahwa terjadi selisih atau penggelembungan dan pengurangan suara Partai Kebangkitan Bangsa di 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Cirendeui, Kelurahan Pisangan, Kelurahan Rempoa, Kelurahan Rengas. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan a quo dengan alasan sebagai berikut.

Keterangan Pihak Terkait mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara Calon Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan VI, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cirendeui, sebagaimana di dalam tabel (...)

541. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tabel (...)

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Saya anggap dibacakan. Di halaman 7, Yang Mulia.

543. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

7 atau 8?

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

7 dan ... 7 dulu.

545. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Tapi tabelnya di halaman 8, ya?

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Ada di halaman 7 paling bawah.

547. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu dulu! Berarti saya salah ini. Oke, sebentar, Bu.

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Ya, baik.

549. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, ya, benar. Silakan!

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Ya, kemudian keterangannya saya anggap dibacakan. Dan selanjutnya, B, keterangan Pihak Terkait mengenai selisih perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan VI, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pisangan, sesuai dengan tabel di halaman 8.

551. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Dan penjelasannya saya anggap dibacakan.

553. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus, C.

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Kemudian, C, keterangan Pihak Terkait mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan VI, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rempoa, sesuai dengan tabel dan saya anggap bacakan. Kemudian, keterangannya pun saya anggap dibacakan.

Kemudian, D, keterangan Pihak Terkait mengenai selisih jumlah perolehan suara pada partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan VI, Kecamatan Timur, Kelurahan Rengas, sesuai dengan tabel dan penjelasannya kami anggap dibacakan.

555. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Kemudian bahwa tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Permohonan. Bahwa terdapat selisih atau pengurangan suara Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, keterangan Pihak Terkait mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan VI, kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cirendeu, sesuai dengan tabel dan kami anggap dibacakan beserta dengan penjelasannya. Kemudian (...)

557. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 12, lanjut ke 13.

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Halaman 13, keterangan Pihak Terkait mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan VI,

Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pisangan, sesuai dengan tabel dengan penjelasannya kami anggap dibacakan.

Kemudian, halaman 15.

559. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Keterangan Pihak Terkait mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan VI, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rempoa, sesuai dengan tabel dan penjelasannya kami anggap dibacakan.

561. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Kemudian, halaman 16. Keterangan Pihak Terkait mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan VI, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rengas, kami anggap dibacakan beserta dengan penjelasannya.

563. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pokoknya, semuanya samalah yang ditetapkan KPU, ya?

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Betul.

565. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ya (...)

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Berdas ... Petitem (...)

567. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enak ... enak sekali jadi Pihak Terkait ini kan. Pokoknya dibenarkan saja KPU sudah selesai, itu. Silakan, Petitem!

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Baik, Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

569. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ibu ada hubungan Saudara enggak dengan Ibu Ida Fauziah?

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Tidak ada, Yang Mulia.

571. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Wah, ini ada Ida Fauziah yang baru nanti di PKB. Tapi, Partai PKB, ya?

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Betul.

573. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, saya lihat kerudungnya saja. Nah, itu kan ... orang ini kan mencari-cari warnanya, begitu. Kalau ... supaya melihat identitas, pakainya warna yang begitu (...)

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Kebetulan saja, Yang Mulia.

575. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, berarti (...)

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Karena hijau itu (...)

577. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, feeling saya juga (...)

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Kedamaian.

579. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kebetulan juga.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Terima kasih.

581. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ibu Wiwin, ya.

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Ya, terima kasih.

583. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berkarya, enggak ada Pihak Terkaitnya? Tidak? Lalu Perkara 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak ada Pihak Terkaitnya juga? Enggak ada?

Nah kita masuk ini perkara yang paling banyak Pihak Terkaitnya, PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya itu ada PPP, ada PKS, ada PDIP, ya, ada yang lain? Kita mulai dari Pihak Terkait PPP.

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Terima kasih, Yang Mulia. Saya M. Hadrawi Ilham menerima Kuasa nomor urut 1. Sebelum menyampaikan materi Keterangan Pihak Terkait, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa renvoi, yaitu pertama di halaman 7.

585. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Saya cek dahulu, Pak. Halaman 7, ya?

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Baik.

587. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 7 apa yang direnvoi, Pak?

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Halaman 7, baris pertama (...)

589. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Yaitu ada tertulis *seksepsi*, seharusnya eksepsi.

591. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, ini, ya?

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya.

593. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Eksepsi, ya?

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya, eksepsi. Kemudian (...)

595. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau *seksepsi* itu lain lagi artinya, Pak.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya, makanya.

597. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya.

599. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Kemudian di halaman 12.

601. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 12.

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Angka 5 huruf a tulisan (...)

603. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sabar, Pak!

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Tertulis *terhadap dalil ini*, yang seharusnya terhadap dalil Pemohon tersebut.

605. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Kemudian pada halaman 18.

607. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

18.

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Bagian Petitem.

609. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Angka 4.

611. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Harusnya ditiadakan karena ini sama dengan angka 2 Petitem.

613. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, ini dihapus, ya?

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya, dihapus. Kemudian mengenai tanggal, kami sesuaikan dengan tanggal penyerahan perbaikan keterangan Pihak Terkait, yaitu tanggal 12 ini juga di apa ... tulisan tangan, Yang Mulia.

615. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau tanggalnya itu, Pak, sudah ada di cap kita. Jadi Bapak enggak bisa mengubah-ubahnya lagi.

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Baik, kemudian halaman, Yang Mulia. Tertera *1 sampai 19*, yang seharusnya 1 sampai 18.

617. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Baik, kami masuk ke apa ... materi, yaitu mengenai Eksepsi, dianggap dibacakan. Kemudian pokok-pokok Permohonan.

619. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Dari ang ... Pokok Permohonan dari angka 1 dan seterusnya, sampai angka 2, angka 3 dianggap dibacakan, termasuk tabel-tabelnya. Angka 4 juga dianggap dibacakan.

621. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Kemudian kami masuk ke angka 5 pada halaman 12, Yang Mulia.

623. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Angka 5.

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemoh ... Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menerangkan dan menegaskan hal-hal sebagai berikut.

a. Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan yang melarang seorang putra dari pejabat untuk menjadi calon anggota legislatif.

625. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

- b. Bahwa selama proses pencalonan, Saudara H. Iip Miftahul Khoiri tidak menggunakan Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Kemenag, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, atau ASN dari instansi mana pun sebagai tim kampanye. Hal ini dibuktikan dengan daftar tim kampanye yang telah diserahkan kepada KPU secara resmi, Bukti PT-1.
- c. Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, Saudara H. Iip Miftahul Khoiri benar berada di kawasan tersebut untuk berdaya ... berdaya wisata, namun ditemui alat oleh petugas panwasdam, lalu kemudian diminta meninggalkan lokasi untuk mengantisipasi adanya pelanggaran pemilu, Bukti PT-2.

627. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, apa itu bentuknya PT-2 itu?

628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

PT-2 itu, bentuknya berita ... apa namanya ... online.

629. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Online, ya.

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya. Kemudian (...)

631. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kasus kayak begitu saja masuk online, ya?

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya.

633. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, teruskan!

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Baik.

d. Bahwa oleh karena H. Iip Miftahul Khoiri tidak menggunakan ASN Kemenag atau ASN dari instansi mana pun sebagai tim kampanye, maka H. Iip Miftahul Khoiri tidak bisa menggerakkan atau melakukan tekanan kepada guru madrasah, tidak bisa pula memanfaatkan orang tua atau wali murid, tidak mencairkan dana BSM, tidak bisa memanfaatkan atau menekan jemaah calon haji, dan tidak pula bisa menekan penghulu KUA untuk memiih H. Iip Miftahul Khoiri.

635. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, apa lagi? (...)

636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

e. Dianggap dibacakan.

f. (...)

637. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ada pernyataan Pak Mahfud, ya?

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya.

639. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di mana buktinya, ada buktinya enggak?

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Kalau pernyataan Pak Mahfud (...)

641. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Soalnya Pak Mahfud ini kan ngomong di mana-mana ini, kalau enggak dibuktikan gimana kita membenarkan ini?

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Itu tidak ka ... tidak kami ajukan bukti untuk pernyataan Pak Mahfud (...)

643. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, oke.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya.

645. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau enggak, Pak Mahfudnya saja kita bawa nanti ke sini.

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya, baik.

647. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

e dan f dianggap dibacakan, Yang Mulia.

649. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Kemudian.

g. Bahwa justru sebaliknya, Caleg Prinsipal Pemohon yang menggunakan pengaruh ibu kandungnya bernama Irna Narulita yang saat ini sebagai Bupati Pandeglang untuk menggiring, mengarahkan, dan bahkan menekan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih Rizka Amalia

Natakusumah sebagaimana terlihat dalam video yang diberi tanda Bukti PT-3 yang juga diberitakan oleh beberapa media online, yaitu Facebook Banten, News.com, Banten Hits.com, dan (...)

651. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, udah, dianggap dibacakan. Terus!

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya, dianggap dibacakan.

653. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apalagi? (...)

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

B juga dianggap dibacakan.

655. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Kemudian (...)

657. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung ke petitum saja, ya?

658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Langsung ke Petitum.

659. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Saya bantu Bapak jangan terlalu lama juga.

660. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Baik. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal ... tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk mengi ... pengisian keanggotaan DPR RI, Daerah Pemilihan Banten I yang benar adalah sebagai berikut (...)

661. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi dapil 1 ini yang benar 1 ini saja, ya?

662. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya?

663. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini saja yang benar, yang lain tidak benar?

664. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya.

665. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terus, terakhir!

666. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Kemudian, ini ... sesuai dengan tabel yang ada. Kemudian terakhir, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat (...)

667. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Kami, Pihak Terkait, Kuasa Hukumnya M. Hadrawi Ilham dan Tim, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

669. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba ... coba, Pak, lihat di halaman 17, itu. Itu di, "Dalam Eksepsi:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

Itu mau dipertahankan atau mau dihilangkan salah satunya? Saya ini nanya karena lawyer (...)

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Dalam Eksepsi saja (...)

671. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena lawyer senior ini, kelihatan (...)

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya, di dalam eksepsi saja yang di ... dihilangkan, Yang Mulia.

673. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang benar?

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya.

675. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak sudah haqul yakin, ini? Ini menguji ini, pengetahuan umum lawyer, ini. Kalau Pokok Permohonan untuk seluruhnya itu diletakkan di mana? Sudah ... pokoknya nanti dilihat lagi. Pokoknya sudahlah.

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya.

677. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak mau usulkan dipertahankan atau dihapuskan salah satunya?

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Dipertahankan saja dua-duanya.

679. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Pokoknya saya tanya lagi salah lagi setelah ini, nih.

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya.

681. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lebih baik tidak ditanya.

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Ya. Baik.

683. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih.

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

685. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Izin Majelis.

687. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya?

688. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Yang Mulia, Kebetulan kami dari Pihak Pemohon.

689. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Ini mendapatkan atau mendownload (...)

691. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti ... nanti sampaikan (...)

692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Oh, gitu.

693. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sabar! Giliran Anda belum sampai kita dulu di situ, ya?

694. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Oh, ya.

695. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak sabar juga, nih. Susah kalau enggak ada yang sabar begini.

696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Bukan. Maksudnya yang kami download ini kan tidak lengkap (...)

697. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti giliran jawabannya. Kita kasih dulu sekarang Pihak Terkait

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MU'JIZATULLAH

Oh, siap. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

699. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sekarang PK ... PKS.

700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Nurul Amalia nomor urut di Surat Kuasa nomor 27.

701. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, Bu Nurul, ya?

702. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Ya.

703. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

27? Oke. Ibu ikut tanda tangan enggak di sini?

704. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Tanda tangan, Yang Mulia.

705. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ibu tanda tangannya di nomor 3 di sini, ya? Nomor 4. Silakan, Bu!

706. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

707. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

708. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Ada 2 dapil yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu Dapil Banten III dan Dapil Tangsel V.

709. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Pokok-pokoknya saja Bu (...)

710. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Bagian (...)

711. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kalau dibacakan semua ini bisa pingsan kita ini.

712. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Siap, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan, Provinsi Banten, Dapil Banten III. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Banten III sebanyak 34.533 suara adalah tidak benar. Pemohon pun tidak menjelaskan secara rinci di TPS, desa, atau kelurahan mana saja yang mengalami menggelembungan suara Pihak Terkait.

Bahwa dalil Pemohon menjadi kabur karena yang didalilkan sebagai data dari TPS per desa atau kelurahan, sedangkan dalam tabel disandingkan C-1 dan DA-1 rekapitulasi suara per kelurahan di kecamatan yang bersangkutan, bukan DAA-1 rekapitulasi suara per TPS dalam kelurahan yang bersangkutan.

Dengan demikian, data yang telah disandingkan oleh Pemohon tidak jelas karena telah menyandingkan data C-1 dengan DA-1 yang merupakan rekapitulasi per kelurahan. Seharusnya, data C-1 disandingkan dengan data DAA-1, sehingga mudah diketahui penggelembungan suara terjadi pada TPS mana dan pada kelurahan mana.

Tidak benar dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait mengalami penambahan suara perolehan suara di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang sebagaimana di dalilkan oleh Pihak Terkait pada dalil-dalil yang akan disampaikan selanjutnya.

Adapun dalil Pemohon mengenai penambahan suara Pihak Terkait Kelurahan/Desa Muncul sebesar 672 suara adalah tidak benar. Pemohon pun tidak menyebutkan secara jelas dan rinci di TPS mana saja terjadi penambahan suara Pihak Terkait. Pemohon hanya menyampaikan data jumlah TPS di Kelurahan/Desa Muncul sebanyak 27 TPS. Data yang disandingkan oleh Pemohon dilihat dari C-1 dan DA-1 dengan selisih sebagaimana dalil Pemohon sebanyak 672. Sedangkan data yang telah disandingkan oleh Pemohon tidak jelas karena telah menyandingkan data C-1 dengan DA-1 yang merupakan rekapitulasi per kelurahan. Seharusnya, data C-1 disandingkan dengan data DAA-1, sehingga mudah diketahui penggelembungan suara terjadi pada TPS mana dan kelurahan mana.

713. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Adapun jumlah perolehan suara dalam tabel-tabel ... mohon dianggap dibacakan sampai halaman 52, Yang Mulia.

715. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Sebentar, Bu! Saya cari dulu 52 ini dulu. Ini soalnya hampir 100 halaman, ini. 52. Ini 53-nya kosong, Bu?

716. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Ya.

717. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kita langsung ke halaman 54, ya? Ada yang mau ditegaskan di sini? Poin 20?

718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Poin 20, ya?

719. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Oke. Sebentar, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Pemohon terkait adanya penambahan suara Pihak Terkait seba ... sebanyak 34.533 suara ... eh, lima ... mohon maaf, 34.533 adalah tidak benar karena data yang disandingkan oleh Pemohon merupakan Model C-1 dan DA-1, bukan Model DAA-1. Pada Model C-1, DA-1, dan DAA-1, Pemohon tidak pernah berkeberatan dengan perolehan suara Pemohon serta tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon, sehingga tanpa Berita Acara Keberatan, Pemohon seharusnya dianggap menerima keputusan versi Termohon.

721. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Untuk selanjutnya, Dapil Tangsel V akan dibacakan oleh rekan kami, Irfan Rifa'i, Yang Mulia. Mohon izin.

723. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, Pak Irfan!

724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya tinggal menambahkan saja, Dapil Tangsel V ... Tangerang Selatan V (...)

725. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangsel dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

727. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

Lanjut ke halaman 88, Yang Mulia.

729. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

Mohon maaf, 89, Yang Mulia.

731. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

89, ya. Langsung Petitem, ya?

732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

Poin ... poin 79, Yang Mulia.

733. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, oke.

734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

Ya.

735. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

80 atau 79?

736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

79 dan 80, Yang Mulia.

737. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

738. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

79. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Keberatan terhadap rekapitulasi suara dalam Formulir Model DAA-1 yang dikeluarkan oleh Termohon. Dengan demikian, maka total suara yang benar adalah untuk suara PKS dan Nasdem di Pondok Aren adalah PKS sebesar 23.160 dan Nasdem sebesar 7.586.

739. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Itu ada buktinya, ya?

740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

Poin 80 (...)

741. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada buktinya enggak cerita ini?

742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

Ada, Yang Mulia ... ada.

743. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

744. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

Kemudian, poin 80. Bahwa total perolehan suara Pihak Terkait adalah benar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana data yang didapat berdasarkan Model DAA-1, sehingga tidak ada penambahan suara atau penggelembungan, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun berdasarkan DAA-1 se-Kecamatan Pondok Aren, perolehan suara Pihak Terkait sebesar 23.160. Perolehan suara Pemohon=7.586. Pemohon tidak pernah melakukan keberatan, telah menandatangani Model DAA-1 se-Kecamatan Pondok Aren dan tidak ada keberatan Pemohon terhadap Model DAA-1, bahkan tidak ada Berita Acara yang menerangkan keberatan Pemohon terhadap perolehan suara, sebagaimana versi Termohon (...)

745. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Lanjut Petitum!

746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN RIFA'I

Selanjutnya, Petitum dibacakan oleh Bu Nurul Amalia.

747. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian anggota DPR RI Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang telah benar.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten III, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut.

1) PKS=375.097.

2) Nasdem=123.128.

748. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, lanjut.

749. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Kemudian, menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan V adalah sebagai berikut.

1. PKS=23.160.

2. Nasdem=7.586.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Nurul Amalia dan Irfan Rifa'i. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

750. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Terakhir, PDIP. Siapa yang mau menyampaikan? Karena Anda datangnya telat, ya, di situ sajalah. Nanti ... nanti Pak Fadli protes pula ke saya, ya? Itu resiko telat. Nah, duduknya belakang. Siapa namanya ini?

751. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

752. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebaikan.

754. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Namanya siapa?

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Harli Muin (...)

756. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor berapa di sini?

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

36, Yang Mulia.

758. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Saya cari, ya. Semangatnya masih kayak yang kayak kemarin enggak?

759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Siap, Yang Mulia.

760. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Waduh, ini luar biasa kalo semangatnya ini. Nanti kita suruh berbaris dilantik di depan Istana Negara itu, sama dengan Akpol-Akpol atau yang baru tamat itu.

761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Siap, Yang Mulia.

762. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, silakan! Pokok-pokoknya saja, ya!

763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Siap, Yang Mulia.

764. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Sebenarnya kami memberi jawaban ini ada sekitar 100 halaman, Yang Mulia, tapi Yang Mulia jangan khawatir, kami sudah meringkasnya.

766. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak khawatir saya. Enggak juga sampai 100 ini harus koreksi ini, 90 itu sudah masuk halaman tanda tangan.

767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Pastikan, Yang Mulia, menerima yang tanggal 8.

768. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang tanggal berapa? Ini tanggal 11 Juli lho.

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

11 Juli, ya ... 11 Juli.

770. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

11 Juli, Yang Mulia.

772. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini.

773. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Siap, Yang Mulia.

774. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, langsung saja.

776. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung ke Petitum maksudnya?

777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Tidak, Yang Mulia.

778. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

779. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Harus ada sebab-akibat terlebih dahulu.

780. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Benar, benar, silakan!

781. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, Permohonan Pemohon sama sekali tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat karena tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara melalui TPS per TPS.

782. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

783. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Dimana seharusnya sangketa hasil dihitung mulai dari TPS. Sementara dalil yang dibangun oleh Pemohon langsung hasil perolehan suara per desa atau berdasarkan pada DA-1. Jadi tidak ada perolehan suara berdasarkan C-1 yang per desa, seharusnya DAA-1.

784. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Bahwa membaca Permohonan Pemohon (...)

786. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Turunkan sedikit!

787. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Siap, Yang Mulia.

788. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

789. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Sama sekali tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat karena tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara melalui TPS.

790. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu sudah 2 kali disebut.

791. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Bahwa sebagaimana uraian dalil Perbaikan Permohonan Pemohon melalui dari halaman 10 sampai halaman 54, pada pokoknya menyebutkan bahwa terjadi penggelembungan suara yang mengakibatkan perbedaan jumlah suara, sehingga merugikan Pemohon.

Bahwa uraian Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan di TPS mana suara Pemohon hilang, sehingga merugikan Pemohon. Narasi yang dibangun langsung ... dibangun langsung oleh Pemohon pada dasarnya kehilangan suara pada desa per desa, bukan pada TPS per TPS. Kami juga menganggap bahwa tidak mungkin semua TPS di desa itu bermasalah. Permohonan Pemohon mendalilkan semua TPS bermasalah, yaitu 7 kecamatan, 49 kelurahan di Kota Tangerang Selatan, dan juga di Kabupaten Tangerang, Pemohon mendalilkan 9 kecamatan, dan 76 desa, semua bermasalah, Yang Mulia.

792. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

793. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Bahwa uraian Pemohon tersebut sangat tidak jelas karena telah mendalilkan seluruh TPS yang diang ... yang Pemohon anggap

merugikan Pemohon. Jumlah TPS kira ... 6.164 TPS yang oleh Pemohon anggap bermasalah di Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Bahwa Pemohon sendiri tidak bisa menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang. Rekapitulasi penghitungan suara dimulia dari TPS. Sesungguhnya yang dituangkan dalam Form Model C-1 menurut ketentuan Pasal 53 PKPU Nomor 3.

Jika seandainya ada keberatan di TPS seharusnya ditulis di C-2, kami memeriksa dengan metode satu per satu C-1 salinan, DAA-1 salinan, kami melihat bahwa Pemohon menandatangani semua itu, dan kami tidak melihat ada C-2 yang di keberatan yang dibuat oleh Pemohon. Kalau seandainya ada C-2 pasti itu akan diselesaikan di kecamatan, tapi itu tidak ada, Yang Mulia.

Kami juga tidak melihat ada DAA-2 yang dibuat oleh Pemohon, kalau ada DAA-2 seharusnya menurut ketentuan Pasal 378 diselesaikan di tingkat KPUD, itu sama sekali tidak ada.

794. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

795. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Dengan demikian, kami menganggap bahwa masalah sudah selesai.

796. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus, Petitem! Kalau sudah selesaikan kan langsung ke Petitem, kan?

797. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

798. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung ke Petitem saja, Mas, tidak apa-apa.

799. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Siap, Yang Mulia. Jadi dalam pokok perkara bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon.

800. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

801. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Bahwa dalil ... bahwa dalil-dalil yang Pihak Terkait kemukakan pada bagian Eksepsi ... ya, monggo ... mohon dianggap dibacakan yang tadi.

802. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

803. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

804. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

805. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01 dianggap dibacakan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Rasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR ... anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan Banten III yang benar sepanjang daerah Kota Tangerang Selatan.

806. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Perolehan suara PDI Perjuangan=173.400.

808. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, lanjut!

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Nasdem=24.902.

810. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus!

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Untuk kabupaten ... sepanjang Kabupaten Tangerang, PDI Perjuangan=259.823, Nasdem=70.735.

812. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus!

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Ban ... sepanjang Daerah Pemilihan Banten III untuk seluruhnya yang benar adalah sebagai berikut. PDI Perjuangan=647.633, Nasdem=123.128.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

814. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Harli. Soalnya dipantau langsung oleh Tengku Umar ini.

Terakhir Partai Demokrat, ini dari Demokrat juga? Pak Fadli, ya? Ya, silakan!

815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Siap, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

816. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Keterangan Pihak Terkait ini kami tidak banyak, Yang Mulia, hanya terdiri dari 14 halaman.

818. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Mohon diperiksa apakah sama halaman 12-nya terselip, Yang Mulia.

820. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 12?

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Ya.

822. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Izin kami menyampaikan halaman 12-nya.

824. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung ke Petitum maksudnya?

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Tidak. Terselip. Apakah disi ... di yang ada sama Yang Mulia halaman 12-nya, ada?

826. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada.

827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Oh, ada, ya?

828. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Ini (...)

829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Oh, ada berarti.

830. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini versi yang kami terima 12 Juli.

831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Ya, betul.

832. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pukul 11.16 WIB.

833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Oke.

834. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada halaman 12-nya?

835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Oh, ada, Yang Mulia?

836. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Berarti kami yang terselip di sini.

838. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Atau mau kami pinjamkan, enggak?

839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Tidak usah. Sudah diprint di bawah tadi, Yang Mulia.
Kami akan baca secara bergantian untuk menjadi keseimbangan, Yang Mulia. Izinkan teman kami (...)

840. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Masuk ke Pokok Permohonan, ya? Pokok Permohonan saja, Pak Fadli.

841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Saya eksepsikan sedikit saja. Perlu ditegaskan, Yang Mulia. Penekanan-penekanan saja.

842. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, pointers-nya saja, ya?

843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Ya, ya.

844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHROZI

Terima kasih, Yang Mulia.

845. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHROZI

Dalam Eksepsi, pada pokoknya Pihak Terkait menjawab 2 hal. Satu, dalam kaitan Legal Standing. Yang kedua, kaitan dengan ... apa namanya ... Permohonan Pemohon yang kabur.

847. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terus Pokok Permohonan!

848. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHROZI

Dalam halaman 3 (...)

849. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kita ini sudah punya kesepakatan dari awal, di luar Pokok Permohonan itu tidak perlu dijelaskan. Kita saja yang membacakannya.

850. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHROZI

Baik, Majelis.

851. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Terus! Langsung ke halaman 8.

852. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHROZI

Halaman 8. Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa diketahui pada pokoknya, Termohon mendalilkan Pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon berkaitan dengan Berita Acara KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 55 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
2. Bahwa terhadap dalil Termohon tersebut, menurut Pihak Terkait dalil tersebut sangat lemah sebagaimana kata pepatah, "Rapuh ke bawah tidak berdasar, ke atas tidak bergantung, dan di tengahnya digerek penggerek." Karena Pemohon selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam proses terbitnya keputusan Termohon dan Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara keputusan Termohon dengan suara perolehan Pemohon atau pun Pihak Terkait.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon sebagai calon anggota DPR RI, terhadap dalil ini Pihak Terkait menyatakan bahwa Daerah Pemilihan Banten I meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang dan wilayah Kabupaten Lebak. Maka untuk mengetahui perolehan suara di daerah Dapil Banten I tersebut, dapat diketahui setelah dilakukan penghitungan hasil pemungutan suara di tingkat KPU Provinsi Banten. Dengan demikian, dalil Pemohon yang hanya menyebutkan Kabupaten Pandeglang, tapi tidak dapat menguraikan bagaimana proses pengurangan suara dimaksud membuat Permohonan Pemohon tersebut kehilangan arah dan tidak dapat dikonstruksikan sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan pemilu. Oleh karena itu, demi hukum dan keadilan, telah sepatutnya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon a quo.

853. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHROZI

Nomor 4 kami anggap dibacakan.

855. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

856. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHROZI

Nomor 5 selanjutnya kami anggap dibacakan.

6. Bahwa Pemohon menuduh aparaturnya kecamatan menggiring masyarakat berikrar untuk mendukung dan memilih calon anggota legislatif yang memiliki hubungan darah langsung dengan Bupati Pandenglang. Terhadap dalil ini lagi-lagi Pemohon hanya berimajinasi tanpa mampu menguraikan peristiwanya secara detail, terjadi di mana, siapa saja camat yang berikrar, apa ... apa bentuk ikrarnya, serta apa dampak ikrar tersebut kepada perolehan suara Pihak Terkait yang merugikan Pemohon.

Selanjutnya dilanjutkan, Yang Mulia.

857. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait, Rizki Aulia Rahman Natakusumah merupakan anak kandung dari had ... Pasangan Hj. Irna Narulita dan hajah ... H. Dimyati Natakusumah. Menurut Pihak Terkait dalil ini jelas tidak beralasan, apakah kemudian seorang anak bupati atau mantan bupati tidak berhak menjadi anggota DPR, sepanjang dipilih langsung oleh rakyat dan mempunyai kemampuan untuk mengemban amanah tersebut? Hal mana juga diketahui bahwa Pemohon, Vivi Sumantri Jayabaya adalah saudara sepupu kandung dari Iti Octavia Jayabaya yang saat ini juga menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lebak tentu juga mempunyai peluang dan kesempatan yang sama.

Terakhir, Yang Mulia.

858. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

859. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Atas nama Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Caleg DPR RI Nomor Urut 2 Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten I selaku Pihak Terkait, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu

Vivi Sumantri Jayabaya selaku Pemohon dalam perkara a quo yang telah memberikan kontribusi perolehan suara yang cukup signifikan, sehingga Partai Demokrat masih dipercaya oleh konsstituen di Dapil Kabupaten Pandenglang dan Kabupaten Lebak dengan perolehan satu kursi di DPR RI.

860. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

861. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Kemudian dalam Petitum.

862. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

863. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/5/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya.

864. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

865. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Banten I yang benar adalah sebagai berikut. Tabel ini sesuai dengan keputusan KPU, Yang Mulia.

866. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus terakhir.

867. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

868. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb. Ini agak ngesastra sedikit jawabannya. Tadi kalau pepatah tadi tuh pepatah dari Padang sebetulnya, pepatahnya. Pepatah orang Minang itu. Habis, ya?

869. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Habis, Yang Mulia.

870. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Pihak Terkait tidak ada lagi? Selesai. Sekarang ... ya, 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya, Gerindra, ya?

871. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. MAULANA BUNGERAN

Ya, Yang Mulia.

872. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hampir saya ditegur. Sudah siap-siap keliatannya. Mohon maaf, silakan! Ini yang terakhir dari Pihak Terkait.

873. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. MAULANA BUNGERAN

Baik. Terima kasih.

874. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang bacakan siapa?

875. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. MAULANA BUNGARAN

M. Maulana Bungaran, Yang Mulia.

876. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

M. Maulana Bungaran, ya. Sebentar! Tapi ini banyak di sini, yang tanda tangan satu saja, ya? Silakan, Pak Maulana! Pokok-pokoknya saja, ya!

877. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. MAULANA BUNGARAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

878. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini berapa dapil yang dipersoalkan?

879. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. MAULANA BUNGARAN

Satu saja, Yang Mulia.

880. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

881. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. MAULANA BUNGARAN

Baik. Pada pokoknya, Pihak Terkait telah mengajukan Eksepsi, ada 2 eksepsi, kami mohon dianggap dibacakan.

882. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

883. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. MAULANA BUNGARAN

Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil dari Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang terbukti dalam persidangan.

Bahwa dalil Pemohon mengenai persidangan susar ... suara dalam perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Kota Tangerang I adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Bahwa Pemohon dalam tabel perolehan suara telah mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait pada DB-1 DPRD Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I adalah sebanyak 18.064 suara. Hal ini adalah tidak benar dan sangat keliru. Dan patut dipertanyakan, apa dasar Pemohon telah mencantumkan ... mencantumkan perolehan suara Pihak Terkait yang demikian? Karena berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Tangerang Selatan yang disahkan dan dituangkan dalam DB-1, perolehan suara Pihak Terkait adalah 18.083 suara. Dengan demikian, perolehan suara yang benar berdasarkan DB-1 DPRD Kota Tangerang Selatan yang telah ditetapkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Kota Tangerang I adalah sebagaimana tabel, kami mohon dianggap dibacakan.

884. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

885. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. MAULANA BUNGERAN

Bahwa dalil Pemohon adanya perselisihan suara sebagaimana TPS-TPS yang dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka dengan ini, Pihak Terkait membantahnya dan jelas dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta. Sebagaimana Pihak Terkait uraikan sebagai berikut, yaitu untuk Kelurahan Cipayung, Kelurahan Ciputat, Kelurahan Jombang (...)

886. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sawah Baru.

887. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. MAULANA BUNGERAN

Kelurahan Sawah Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Sawah, yang pada pokoknya berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Maka, oleh karenanya, dalil Pemohon adalah keliru dan tidak benar.

Untuk Kelurahan Serua Indah. Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam tabel persandingan pada bagian Posita tentang perolehan suara Pihak Terkait pada Kelurahan Serua Indah, yaitu sebesar 1.408 suara. Namun, kemudian Pemohon meminta kepada Mahkamah dalam Petitumnya untuk menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dalam Kelurahan Serua Indah adalah sebanyak 1.412 suara. Oleh karena terdapat penambahan suara, Pihak Terkait pada Kelurahan Serua Indah yang dimaksudkan oleh Pemohon sebanyak 4 suara.

Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan serta menguraikan dasar adanya penambahan suara Pihak Terkait tersebut, apakah adanya perbedaan antara C-1 dengan DAA-1 dan pada TPS berapa, atau DAA-1 dengan DA-1. Bahwa selisih perolehan suara Pihak Terkait tidak serta-merta dapat dibenarkan karena harusnya didukung oleh bukti adanya perselisihan suara tersebut.

Bahwa merujuk pada dalil-dalil Pihak Terkait sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi dan juga Pokok Permohonan telah berdasarkan bukti-bukti yang sah dan benar, khususnya data C-1 dan DA-1 adalah yang disahkan dan ditandatangani oleh Termohon dan para saksi.

Dengan demikian, sangat jelas dalil Permohonan Pemohon adalah keliru dan tidak benar.

Bahwa karena ter ... telah sepatutnya dan berdasarkan hukum, Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.

888. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

889. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. MAULANA BUNGERAN

Sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Kota Tangerang I, yaitu sebagaimana tabel.

Petitum. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan I adalah sebagai berikut. Nomor Urut Partai 2, Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, perolehan ... perolehan suara=18.083. Nomor Urut Partai 3, Partai Politik PDI Perjuangan, perolehan suara=18.004 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

890. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Maulana, ini sudah selesai semua.

Giliran Bawaslu RI, dipersilakan! Ringkas-ringkasnya saja, nanti semuanya bisa disampaikan ke kita, begitu.

891. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

892. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kita mulai dari Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya!

893. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Baik, dari Bawaslu RI dalam hal ini disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Banten, kita mulai dari Perkara Nomor (...)

894. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

895. BAWASLU: BADRUL MUNIR

7 ... 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PDI Perjuangan.

Pada pokoknya permohonan mendalilkan terjadi penambahan perolehan suara untuk Partai Gerindra dan pengurangan untuk PDI Perjuangan di Kecamatan Ciputat. Pada saat rekapitulasi tingkat kota, tidak ada keberatan yang dituliskan dalam Formulir DB-2 KPU, namun ada keberatan yang disampaikan, tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi dari PDI Perjuangan tidak dapat menunjukkan bukti,

sehingga protes tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Akan tetapi, pada ... ada catatan khusus pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, pengisian DAA, Formulir Model DAA-1 DPRD tidak seketika diberikan kepada saksi partai politik setelah selesainya rekapitulasi masing-masing kelurahan, tetapi baru diserahkan setelah selesai seluruh kelurahan pada kecamatan tersebut. Kemudian Bawaslu telah meminta kepada PPK untuk menarik dokumen DAA-1 yang belum ditandatangani, tetapi sudah disebarkan tersebut, untuk digantikan dengan DAA-1 yang sudah ditandatangani. Itu untuk Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

896. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

897. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Demokrat. Pada pokoknya tentang keberatan Partai Demokrat yang pertama untuk Kecamatan Bojong dan Jiput. Pada saat rekap tingkat kabupaten, tidak ditindaklanjuti karena ternyata ada kesamaan DAA. Kemudian ... sedangkan pada daerah pemilihan tersebut, untuk Kabupaten Lebaknya tidak ada keberatan dari Partai Demokrat. Akan tetapi, keberatan itu muncul pada saat rekapitulasi tingkat provinsi terkait tidak dilakukannya penghitungan ulang surat suara di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak.

898. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di kabupaten enggak ada keberatan, ya? (...)

899. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Tidak ada keberatan di kabupaten, baru tingkat provinsi ada keberatan.

900. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

901. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Kemudian Bawaslu juga telah menyandingkan Model C-1 yang ... yang telah direkap dalam DAA dengan DA-1, memang terdapat beberapa

selisih suara yang kami tidak bisa menyimpulkan signifikan atau tidak, memang ada beberapa perbedaan.

Kemudian Pemohon juga mendalilkan suara untuk Partai Demokrat untuk calon atas nama Vivi Sumantri Jayabaya, dan Rizki Aulia Rahman, dan Bawaslu telah melakukan penyandingan, dan tidak ditemukan perbedaan.

902. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang internal, ya?

903. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Untuk ... ya, internal.

904. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

905. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Kemudian untuk permohonan mengenai tentang keterlibatan bupati terhadap kemenangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Pandeglang memang telah menerima laporan terhadap hal tersebut dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pejabat yang diduga ada kecenderungan kepada calon tertentu, telah ditindaklanjuti ke komrasi ... Komisi Aparatur Sipil Negara.

Kemudian permohonan tentang ... dalil tentang dugaan praktek politik uang yang diberikan kepada seluruh jaringan kepala desa se-Kabupaten Pandeglang. Bawaslu memberikan keterangan bahwa tidak pernah mendapatkan temuan dan/atau menerima laporan terkait hal tersebut.

Kemudian dalil tentang adanya berbagai kegiatan kewilayahan aparatur kecamatan menggiring masyarakat berikrar, Bawaslu Provinsi Banten menerima beberap ... ada laporan, pertama dari Germas dan terhadap laporan tersebut, tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Kemudian dalil tentang adanya cacat prosedur (error in procedural) karena perolehan suara Calon Nomor Urut 2 yang menurut Pemohon dilakukan me ... set ... dengan penyalahgunaan kewenangan dimiliki oleh Termohon, Bawaslu Provinsi Banten tidak pernah mendapatkan temuan dan/atau menerima laporan terkait dalil Pemohon tersebut.

Kemudian Pemohon juga mendalilkan tentang laporan ke Bawaslu Provinsi Banten yang tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi Banten

menyampaikan bahwa benar ada laporan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor 01 dan seterusnya. Setelah diperiksa dalam sidang pemeriksaan administrasi, Bawaslu Provinsi Banten memutuskan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilu.

Demikian untuk nomor perkara tersebut, Yang Mulia.

906. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lanjut!

907. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Nomor (...)

908. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Perkara 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

909. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa. Pokok dalil Permohonan adalah terjadinya pengurangan perolehan suara PKB dan penambahan perolehan suara PAN Dapil Banten VI, Kota Tangerang.

Pada Pleno tingkat kecamatan tidak ada keberatan sama sekali yang dimasukkan dalam Form Model DA-2 KPU dan Bawaslu sudah melakukan penyandingan terhadap C-1 dan DAA-1 dan tidak ditemukan perbedaan. Begitu juga pada rekapitulasi tingkat Kota Tangerang, tidak ada keberatan dari Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

910. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!
Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya.

911. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya. Pada pokoknya Permohonan mendalilkan tentang pengurangan perolehan Partai Berkarya dan penambahan suara Partai Amanat Nasional.

Bawaslu telah melakukan penyandingan data dan memang ditemukan beberapa perbedaan perolehan suara, tapi kami tidak menyimpulkan apakah itu signifikan apa tidak, kami cantumkan dalam

daftar bukti dan keterangan kami. Tetapi, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pandeglang, tidak pernah ada keberatan terkait perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Demikian untuk Partai Berkarya.

912. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Berikutnya Hati Nurani Rakyat ... Partai Hati Nurani Rakyat. Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

913. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perbedaan perolehan suara antara Model C-1 dan DAA-1 di Dapil 1 Kabupaten Tangerang untuk Partai Nasdem terhadap Partai Hanura.

Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada keberatan, khususnya dari Partai Hanura. Kemudian, Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan persandingan data untuk C-1 dan DAA-1, memang terdapat selisih, khususnya di TPS 58 dan 36. Akan tetapi, pada saat rekapitulasi di Kecamatan Ciputat Timur sudah diselesaikan terkait perselisihan tersebut.

Demikian, Yang Mulia.

914. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah tadi, ya? 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sekarang, yang Nasional Demokrat.

915. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasional Demokrat. Pemohon mendalilkan pada pokoknya mengenai selisih suara antara Pemohon dengan PPP untuk Dapil I Banten, juga Dapil III Tangerang Raya, juga terkait keterlibatan ASN.

Untuk Dapil I Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, untuk 2 kabupaten tersebut tidak ada keberatan dari Pemohon. Sedangkan dalam rekapitulasi tingkat provinsi, di DC-2, memang ada keberatan, namun keberatan tersebut disampaikan setelah penetapan rekapitulasi.

Kemudian Bawaslu juga telah melakukan persandingan DB dengan DC dan tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk PPP dan Partai Nasdem sebagaimana dalil Pemohon.

Kemudian terkait ASN atas nama Iip Miftahul Khoiri, tidak ada keberatan yang dicantumkan pada saat rekapitulasi terkait hal ini dan juga tidak ada laporan ... tidak ada yang masuk menjadi laporan atau temuan terkait ASN Kementerian Agama ini. Karena memang sudah dilakukan sosialisasi untuk pencegahan tersebut.

Kemudian dalil tentang bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menindaklanjuti, kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor ... Pemilu Nomor 7, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Ketua Bawaslu Pandeglang sudah nonaktif atau cuti dari ASN-nya, sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan bertindak tetap profesional karena semua keputusan dihasilkan melalui pleno, bukan keputusan sendiri.

Dan terkait hal tersebut ... maaf, selanjutnya tentang perolehan suara untuk Dapil I tidak ada keberatan. Karena ini RI, tidak ada keberatan pada tingkat nasional pada rekapitulasi KPU tingkat nasional.

Kemudian untuk Dapil III provinsi Banten, pada saat rekapitulasi tingkat Tangerang ... Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, juga tidak ada keberatan yang dituliskan dalam Form Model DB-2 KPU.

Kemudian Bawaslu juga sudah menyandingkan, baik DB-1 dan D ... DC-1 di Dapil III Provinsi Banten, tidak ditemukan perbedaan.

Kemudian, Partai Nasdem sebagai Pemohon juga mendalilkan pengurangan suara untuk Partai Nasdem dan penambahan suara untuk PKS di Dapil Kota Tangerang V, Bawaslu sudah melakukan penyandingan, memang ditemukan beberapa perbedaan yang kami uraikan dalam keterangan yang lebih lengkap kami.

Kemudian, pada rekap provinsi tidak ada keberatan ... keberatan, baik lisan maupun tertulis yang dimasukkan dalam Form DC-2 KPU.

Demikian, Yang Mulia.

916. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Selesai semua, ya? Ini bagus sekali caranya Pak Afif mengajarkan bagaimana cara menjawabnya, begitu. Jadi, kita terbantu juga. Ada yang diakui. Tapi yang paling penting itu, kalau ada perbedaan dikatakan ada, ndak usah dikatakan, "Signifikan atau tidak," itu menjadi wilayah Hakim nanti memutuskannya, gitu. Agar Hakim bekerja juga, begitu. Kalau semuanya sudah diputuskan Bawaslu, nanti kita tinggal diam saja, jadi repot juga jadinya.

Selesai? Tidak ada lagi? Sekarang giliran ... apa ... amanah ke saya, saya kembalikan kepada Ketua Panel. Giliran Ketua Panel untuk mengambil kembali ... apa ... garis komando untuk pengesahan alat bukti. Saya kembalikan.

917. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita ke pengesahan alat bukti. Pertama untuk Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Termohon memasukkan Bukti T.001-Banten I-Demokrat-54-14-16 sampai dengan T.001-Banten-Demokrat-54-14-16. Termohon, betul, ya? T.011 ... T.01-Banten I-Demokrat-54-14-16 sampai dengan T.011-Banten I-Demokrat-54-14-16. Betul, ya?

918. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Benar, Yang Mulia.

919. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, masih Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Pihak Terkait ... Pihak Terkait Demokrat. Memasukkan Bukti P-1 sampai dengan ... PT-1 sampai dengan PT-5?

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Ya.

921. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FADLI NASUTION

Ya, benar, Yang Mulia. Cuma 5 saja.

923. KETUA: ASWANTO

Ya, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu untuk Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. PK-13 ... PK-13.00 sampai dengan 001 ... oh, sori. Saya ulangi, PK-13.0001 sampai dengan PK-13.2005. Bawaslu, ya? Betul?

924. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Ada ... di belakangnya ada lanjutan lagi itu, Yang Mulia. Ada 3 bagian.

925. KETUA: ASWANTO

Oke. Ini ya sudah digabung, ya? PK-13.0001 sampai dengan PK-13.2005. Masih ada lagi yang belum? Ini untuk ... untuk ... apa ... untuk ... Banten, untuk DPR ... DPR RI Banten I, ya? Cilegon kita enggak ... enggak ... apa namanya ... enggak kita sahkan lagi karena kan kemarin Pemohonnya enggak membacakan, ya, sudah lewat waktu.

926. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Ini, saya ulangi, Yang Mulia. Dari PK-13.1001 sampai dengan PK-13.1420, kemudian PK-13.2001 sampai PK-13.2005, PK-13.0001 sampai PK-13.0051.

927. KETUA: ASWANTO

Oke. Memang Anda memasukkan ada PK-13.0018, kemudian PK-13.0024, PK-13.0041, ini masih ada catatan, ya? Ini masih ada catatan, nanti disinkronkan kembali dengan bagian Kepaniteraan, ya? Baik, kita sahkan yang tadi, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DPRD Kota Tangsel I, Termohon memasukkan Bukti T-001-Kota Tangerang Selatan I-PDIP-74-03-16 sampai dengan T-00 ... 006-Kota Tangerang Selatan I ... Kota Tangerang Selatan I-PDIP-74-03-16. Termohon, betul, ya?

928. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHAMD JAZULI

Betul, Yang Mulia.

929. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait Gerindra, memasukkan Bukti PT-2 DPRD Kota 1 sampai dengan PT-2 DPRD Kota 13?

930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. MAULANA BUNGERAN

Betul, Yang Mulia.

931. KETUA: ASWANTO

Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Bawaslu dalam Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Bukti yang dimasukkan adalah PK-13.8001 sampai dengan PK-13.8013 betul, ya? Ini ada catatan juga untuk PK-13.001 sampai dengan PK ... PK-13.040.

Oke, ini bukti yang dimasukkan ini yang PK-13.0 ... PK-13.001 sampai dengan PK-13.0040 itu bukti yang dimasukkan, tetapi tidak ada di dalam Permohonan, itu di luar Pokok Permohonan, ya.

Kita sahkan yang PK-13.8001 sampai dengan PK-13.08013.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini Pemohon ada ... ini untuk Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohon ada bukti tambahan, ya? P-1-Nasdem-Banten I-DPR RI sampai dengan P-17-Nasdem-Banten I-DPR RI?

932. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERIYANTO CITRA BUANA

Ya.

933. KETUA: ASWANTO

Kemudian P-32, P-154, P-155, P-156, P-315, P-316, P-60 ... P-646, P-745, P-901, P-957, P-1437, P-1453, P-1562, P-1571, P-1605, P-1665, P-1680, P-1689, P-1690, P-1789, P-1792, P-3103, P-3222, P-3236-Nasdem-Banten III-RI. Kemudian ada lagi tambahan P-1 tambahan Nasdem, Kota Tangerang Selatan, betul, ya? Untuk Pemohon Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon untuk Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bukti yang dimasukkan adalah T-001-Banten I-Nasdem 192-05-16 sampai dengan T-002-Banten I-Nasdem-192-05-16 betul, ya?

934. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Benar, Yang Mulia.

935. KETUA: ASWANTO

Kemudian T-003-Banten III-Nasdem-192-05-16 sampai dengan T-012-Banten III-Nasdem-192-05-16.

936. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Benar.

937. KETUA: ASWANTO

Betul, ya. Kemudian T-013-Kota Tangerang Selatan ... Tangerang Selatan V-Nasdem-192-05-16 sampai dengan T-028-Kota Tangerang Selatan ... Selatan V-Nasdem-192-05-16 betul, ya?

938. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Betul, Yang Mulia.

939. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait atau Bawaslu ... Bawaslu dulu. Bawaslu, PK-13.0001 sampai dengan PK-13.0046. PK-31 ... PK-13.1-001 sampai dengan PK-13.1-012, PK-13.2-001 sampai dengan PK-13.2-007, PK-13.3-001 sampai dengan PK-13.3-116, PK-13.5-001 sampai dengan PK-13.5-005, PK-13.8-001 sampai dengan PK-13.8-098 Pihak Bawaslu, ya? Baik.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, Pihak Terkait PKS bukti yang dimasukkan adalah PT-1 sampai dengan PT-138, kemudian PT.A sampai dengan PT.D?

940. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Ya. Benar, Yang Mulia.

941. KETUA: ASWANTO

Betul, ya, untuk Pihak Terkait PKS, ya?

942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURUL AMALIA

Ya.

943. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Terkait PDIP, PT-1 sampai dengan PT-156 betul, ya? Ada catatan untuk PDIP, ini Bukti PT-16 itu belum ada fisiknya ... eh, sori, PT-61 ... PT-61 itu belum ada bukti fisiknya, ya? Kita sahkan selain yang belum ada fisiknya.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait PPP, PT-1 sampai dengan PT-4B, betul?

944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. HADRAWI ILHAM

Betul, Yang Mulia.

945. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini ada bukti tambahan dari Pemohon P-1 sampai dengan P-26? Ini Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? PKB. Ada? Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon memasukkan Bukti T-001-Banten VI-PKB-27-01-16 sampai dengan T-007-Banten VI-PKB-27-01-16. Kemudian T-008-Banten VI-PKB-27-01-16, betul, ya, Termohon, ya?

946. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Betul, Yang Mulia.

947. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu memasukkan Bukti PK-13.5-001 sampai dengan PK-13.5-199, kemudian PK-130 ... 13.0-001 sampai dengan PK-13.0-040, betul ya? Kemudian masih ada catatan untuk Bawaslu, PK-13.5 sampai dengan PK-13.3 sampai deng ... eh sori, PK-13.5-133 sampai dengan PK-13.5-134 itu antara daftar bukti dengan alat bukti fisik belum sinkron. Kita saikan yang sudah sinkron, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya. Termohon memasukkan Bukti T-001-Pandeglang V-Berkarya-206-07-16 sampai dengan T-009-Pandeglang V-Berkarya-206-07-16, betul, ya?

948. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Benar, Yang Mulia.

949. KETUA: ASWANTO

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu memasukkan Bukti PK-13.1-001 sampai dengan PK-13.1-063 dan PK-13.0-001 sampai dengan PK-13.0-040, betul Bawaslu, ya?

950. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Mohon izin, Yang Mulia.

951. KETUA: ASWANTO

Ya.

952. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Untuk PK-13.1 itu sampai 064.

953. KETUA: ASWANTO

Ini sampai 063. Yang kami terima dan sudah kami diverifikasi baru sampai 63, nanti ... kami cek kembali, ya?

954. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Ya, sudah dimasukkan ke Kepaniteraan, Yang Mulia. Terima kasih.

955. KETUA: ASWANTO

Oke. Tadi sudah diketuk, ya?

956. BAWASLU: BADRUL MUNIR

65 sudah, Yang Mulia.

957. KETUA: ASWANTO

Ya, sudah diketuk, kan?
Kemudian Pihak Terkait PAN, PT-1 sampai dengan PT-17. Mana PAN? Oh, enggak hadir, ya? Disaksikan oleh.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Nasdem ... eh sori ... untuk Hanura dulu. Hanura ... Nasdem sudah, ya. Ini yang terakhir untuk Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohon ada bukti tambahan, P-57 sampai dengan P-69. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon memasukkan T-001-Tangerang I-Hanura-35-13-16 sampai dengan T-006-Tangerang I-Hanura-35-13-16 untuk Termohon. Betul, ya?

958. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul.

959. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait PKB, PT-01 sampai dengan PT-37, betul, ya?

960. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Benar, Yang Mulia, benar.

961. KETUA: ASWANTO

Benar, ya?

962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Ya.

963. KETUA: ASWANTO

Enggak betul tapi benar, ya?

Baik, untuk Bawaslu, PK-13.0-001 sampai dengan PK-13.0-087, PK-13.08-001 sampai dengan PK-13.8-044, PK-13.0-001 sampai dengan PK-13.0-040. Betul, ya, Bawaslu, ya?

964. BAWASLU: BADRUL MUNIR

Betul, Yang Mulia.

965. KETUA: ASWANTO

Ada catatan untuk PK-13.08-23 itu buktinya tidak jelas, ya? Nanti diperbaiki kembali. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Informasi mengenai penundaan sidang, sidang kita ini ditunda sesuai dengan batas yang ditentukan kemudian oleh MK. Jadi penundaan sidang Saudara tinggal tunggu panggilan resmi dari Mahkamah, kapan kita sidang lanjutan. Dengan agenda mendengarkan saksi/ahli untuk semua Pihak, ya, Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Ada catatan ... ada catatan, saksi dan ahli berapa jumlah saksi dan ahli, nanti akan disampaikan di dalam surat panggilan ... panggilan sidang, ya. Kemudian, identitas saksi sudah harus dimasukkan lebih awal, serta pokok-pokok yang akan disampaikan. Demikian juga dengan ahli, CV dan keterangan ahli sudah harus dimasukkan lebih awal. Kapan dimasukkan, yaitu paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan, pada pukul 12.00 WIB, ya.

Sekali lagi, informasi atau penyampaian ini sekaligus sebagai ... apa namanya ... saya ulangi. Bahwa panggilan resmi untuk sidang berikutnya akan disampaikan kemudian. Saudara tinggal menunggu saja. Jelas, ya?

Baik sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.08 WIB

Jakarta, 16 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.